

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang semakin berkembang di setiap aspek kehidupan dan mempengaruhi pula globalisasi di bidang industri dengan diikuti oleh modernisasi di bidang digital yang semakin berkembang pesat, termasuk untuk fasilitas sosial yang didirikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya agar mempermudah kehidupan masyarakat di negara tersebut.

Semenjak terbentuknya peraturan otonomi daerah di Indonesia yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001, secara resmi diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat kepada daerah. Salah satu pendapatan dan penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian suatu daerah dapat diukur dari pendapatan kontribusi dari PAD terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD), semakin kecil pendapatannya semakin tinggi tingkat ketergantungannya dengan pusat (D. W. Putri, 2019, hlm. 1).

Menurut Pekei (2016, hlm. 2) “Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.”

Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, maka Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing (Machmud, dkk. 2014; Ramadhan, 2017)

Disisi lain Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan maka setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pertanggungjawaban tersebut tidaklah cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai (Mahmudi, 2019).

Pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segala aspek penerimaan daerah. Melalui PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa uraian yang telah disebutkan tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi bagi penerimaan PAD (Mbembe, 2018, hlm. 6)

Tabel 1.1
Rasio PAD Kota Bandung

Rasio PAD Tertinggi				Rasio PAD Terendah			
Daerah	TA 2017	Daerah	TA 2018	Daerah	TA 2017	Kab/Kota	TA 2018
Kab. Badung	82,0%	Kab. Badung	86,8%	Kab. Mamberamo Tengah	0,1%	Kab. Mamberamo Tengah	0,1%
Kota Surabaya	55,6%	Kota Surabaya	58,0%	Kab. Deiyai	0,3%	Kab. Deiyai	0,2%
Kota Batam	47,5%	Kota Bandung	50,9%	Kab. Dogiyai	0,3%	Kab. Tambrauw	0,2%
Kota Tangerang Selatan	47,4%	Kota Batam	49,5%	Kab. Pegunungan Arfak	0,4%	Kab. Tolikara	0,2%
Kota Bandung	47,1%	Kab. Tangerang	48,4%	Kab. Tolikara	0,4%	Kab. Maybrat	0,2%

Sumber : D.IPK. Kemenkeu RI (diolah)

Dapat dilihat dari tabel bahwa kota Bandung memiliki rasio PAD yang sangat tinggi, yaitu seber 47,1% pada tahun 2017 dan 50,9 % pada tahun 2018.

Maka hal ini menjelaskan bahwa pendapatan PAD kota Bandung terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. (DJPK, 2018, hlm. 19)

Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, sedang giat meningkatkan pembangunan di segala sudut. Salah satunya pelayanan di bidang transportasi. Pemerintah Bandung yang ingin menyelesaikan masalah parkir liar dan ingin mengelola kota supaya parkir lebih kondusif dan untuk meningkatkan PAD Bandung juga sehingga pemerintah memberikan kebijakan pembuatan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di beberapa titik.

Seperti halnya yang dilakukan di San Francisco pada tahun 2011 yang telah memasang terminal parkir di 7.000 titik dengan tarif yang dievaluasi setiap dua bulan sekali ini sangat efektif dan mempermudah para pengguna parkir, pengelola parkir, dan mengurangi kemacetan yang terjadi di San Francisco. Terminal parkir yang dipasang di San Francisco sudah termasuk banyak kemajuan dengan tarif yang disesuaikan dan tempat-tempat yang memaksimalkan penggunaan terminal parkir dan spot-spot yang dapat di atur (Shoup, 2015, 2016).

Hal ini yang memicu pemerintah daerah Bandung pada tahun 2017 optimis untuk memasang parkir meter atau TPE di 57 titik ruas jalan dengan 445 unit TPE diseluruh kota Bandung dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 80 Miliar, terlepas tidak ada pertimbangan beban-beban yang akan muncul dan rintangan untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai hal yang baru diterapkan di kota Bandung. Langkah ini memaksa masyarakat sebagai stakeholders untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan ini (Qohar, 2018, hlm. 36).

Merriman (2019, hlm. 401) mengungkapkan bahwa “kebijakan pemasangan terminal parkir harus disertai dengan kesiapan atas organisasi parkir, agen parkir, dan pemakai jasa parkir sehingga kebebasan dalam memilih, privasi, keamanan dapat terjaga dimana material parkir ditempatkan dilingkungan ramai maupun terbuka. Dan juga pembagian teretori mesin agar tidak menjadi barang yang tidak terpakai karena terlalu menumpuknya suatu disatu tempat”.

Tujuan pemasangan TPE ini untuk meminimalisir parkir liar dan memaksimalkan pendapatan retribusi parkir sehingga parkirpun akan lebih tertata dan mengurangi kemacetan. Seperti halnya di Los Angeles, Amerika Serikat yang menerapkan sistem ini dengan kesiapan yang matang, dengan memasang sensor, penerapan disetiap sudut daerah dengan pengujian terlebih dahulu hingga tidak menyebabkan macet, dan menerapkan harga yang sesuai dengan apa yang disetujui oleh masyarakatnya itu sendiri agar tidak menjadi beban untuk masyarakat Los Angeles (Brazil, 2018, hlm. 2).

Dikarenakan sosialisasi yang kurang aktif dari pemerintah, sehingga pemerintah menyediakan juru parkir yang digaji setiap bulan sebesar Rp. 1,8 juta untuk memberikan bantuan penggunaan mesin parkir yang masih asing untuk masyarakat. Juru parkir yang memberikan jasa ini direkrut sebanyak 700 orang dengan tarif gaji yang tetap setiap bulannya. Sehingga pengeluaran untuk mesin parkir atau TPE yang di pasang di Bandung telah menghabiskan dana sebesar Rp. 80 miliar nya ditambah dengan Rp. 1,26 miliar/ Tahun sebagai *fix cost* dan biaya lain-lain untuk pemeliharaan atau sebagainya sebagai *Variable cost* (Diputra, 2018).

Dengan adanya pemasangan TPE ini secara tidak langsung diharapkan memberikan kontribusi pada pendapatan retribusi parkir dan secara keseluruhan PAD kota Bandung dimulai pada tahun 2018 pada saat banyak dari mesin parkir tersebut disahkan untuk dapat digunakan secara keseluruhan. Penelitian pendahulu mengenai sistem penggunaan terminal parkir yang dilakukan oleh (Ahmad Reza, 2017) didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan parkir meter dan efektivitas penggunaan mesin parkir. Dapat diartikan bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana penggunaan terminal parkir terlepas dengan harga parkir yang lebih mahal atau pun sebaliknya, masyarakat akan tetap memakai nya karna hal itu dibutuhkan dengan catatan pengetahuan pemakaiannya sudah terpenuhi. Didukung oleh penelitian (Suherman, 2020) dan (Wildan, 2019) bahwa pemasangan TPE di Kota Bandung dapat dikatakan belum optimal dikarenakan kesiapan yang kurang dari segi tempat strategis dan

pemahaman dari masyarakat yang sebagai konsumen pemakai TPE dan ditambah dengan kesadaran masyarakat yang kurang pula sehingga hal ini mengakibatkan mesin TPE yang sudah terpasang itu terbengkalai.

Dengan adanya faktor-faktor yang telah dikemukakan maka penulis mendapatkan hal yang menarik untuk diuji yaitu dengan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebelum dan sesudah penerapan sistem terminal parkir elektronik di terapkan dengan membandingkan penerimaan retribusi parkir pinggir jalan/*on street* di titik yang pada saat ini diberlakukannya TPE.

Alasan penulis melakukan penelitian mengenai Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung ini dikarenakan banyaknya fenomena dan masalah yang timbul setelah kebijakan ini keluar, didukung dengan kota Bandung adalah kota pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan ini langsung secara meluas setelah dilakukannya simulasi di jalan Braga dan sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh berbagai pihak. Maka dari itu penulis akan mengangkat sebuah judul yaitu “Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE)” Guna mengetahui bagaimana keberadaan terminal parkir elektronik di kota Bandung apakah memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bandung atau hanya sebagai beban untuk pemerintah daerah terhadap PAD nya.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir sebelum pemasangan TPE pada PAD?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir setelah pemasangan TPE pada PAD?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kontribusi penerimaan retribusi parkir pada PAD sebelum dan sesudah pemasangan TPE?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir sebelum pemasangan TPE pada PAD
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir setelah pemasangan TPE pada PAD
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kontribusi penerimaan retribusi parkir pada PAD sebelum dan sesudah pemasangan TPE

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pemasukan negara melalui Retribusi parkir dari parkir meter
- b. Bagi Pengelola TPE (BLUD UPT), seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- c. Bagi Penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari

selama mengikuti program perkuliahan pajak di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik

